



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)
DINAS KETAHANAN
PANGAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG
2017**



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016 – 2021

DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG
2017


KATA PENGANTAR

Dalam rangka memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan Kota Semarang yang berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 – 2021. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016 – 2021 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang disesuaikan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah dari Kantor menjadi Dinas sesuai dengan Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. Pelaksanaannya dirancang selama lima tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi kinerjanya setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya. Sesuai tugas dan fungsinya tahun 2016 – 2021, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Program Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Pengembangan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan, Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Mutu dan Keamanan Pangan serta Aksi Desa Mandiri.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016 –2021 ini diharapkan dapat memberikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Semarang, 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Semarang



Drs. SAPTO ADI SUGIHARTONO, MM

Pembina Tk I

NIP. 19640123 198903 1 011

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG | |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 11 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 11 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 15 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 16 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 18 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 19 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 23 |
| 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis | 23 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 28 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 30 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 32 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 42 |
| BAB VIII PENUTUP | 43 |
| LAMPIRAN | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, terjadi perubahan kewenangan antara pusat dan daerah. Pelaksanaan dari undang-undang ini menyebabkan adanya perubahan pada struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Karena RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat daerah masih disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada RPJMD dan Renstra untuk menyesuaikan dengan kewenangan-kewenangan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis menjadi sangat penting artinya bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan secara lebih optimal melalui pemanfaatan berbagai kekuatan dan peluang yang dimiliki dan perhitungan yang matang atas berbagai kelemahan dan kendala yang dihadapi didasarkan pada kemampuan, karakteristik dan kebutuhan nyata.

Penyelenggaraan segenap aktivitas pembangunan ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang mengarah pada terciptanya *good governance* sudah seharusnya mengikutsertakan segenap komponen dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang memberikan arah atau pedoman bagi segenap *stakeholder* untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada pengembangan distribusi pangan, pengembangan ketersediaan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat Kota Semarang yang dipandang strategis.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya merupakan operasionalisasi dari visi dan misi Walikota Semarang pada periode tersebut di urusan pangan, serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan tertentu.

Segenap *stakeholders* urusan ketahanan pangan menyadari bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan ketahanan pangan berdasarkan pada kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan nyata dibutuhkan adanya dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat strategis. Oleh karena itu, segenap *stakeholders* urusan ketahanan pangan telah membangun suatu kesepakatan dan komitmen untuk mendukung Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016–2021, sejak dari tahapan formulasi, implementasi hingga tahapan evaluasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Permentan Dewan Ketahanan Pangan;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016–2021 adalah penyesuaian rencana lima tahunan urusan ketahanan pangan yang menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai akibat ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. Berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis urusan ketahanan pangan yang disusun mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Dalam Rencana Strategis ini dijabarkan potret dan rencana pembangunan, yang memuat nilai-nilai strategis, kondisi lingkungan internal dan eksternal, dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengerahkan semua unsur kekuatan, kesempatan, peluang dan berbagai faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Penyusunan Rencana Strategis ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai pelaksana pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan yang mengedepankan *Good Government* dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Review Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
Memuat tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi dan misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat strategi dan arah kebijakan urusan pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ketahanan pangan tahun 2016-2021
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan
- h. BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang disebutkan bahwa kedudukan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dengan perubahan dari Kantor menjadi Dinas menyebabkan cakupan tugas dan fungsi yang semakin luas.

TUGAS

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang :

1. Perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang konsumsi, penganeekaragaman dan pengembangan pangan, dan bidang keamanan pangan;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang konsumsi,

- penganekaragaman dan pengembangan pangan, dan bidang keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 5. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai;
 6. Penyelenggaraan kerja sama bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, dan bidang keamanan pangan;
 7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan;
 8. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, dan bidang keamanan pangan;
 9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
 10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang konsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan, dan bidang keamanan pangan;
 11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris,
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan pangan
4. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

5. Kepala Bidang Konsumsi, Panganekaragaman dan Pengembangan Pangan
6. Kepala Bidang Keamanan Pangan

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang konsumsi, panganekaragaman dan pengembangan pangan, dan bidang keamanan pangan.

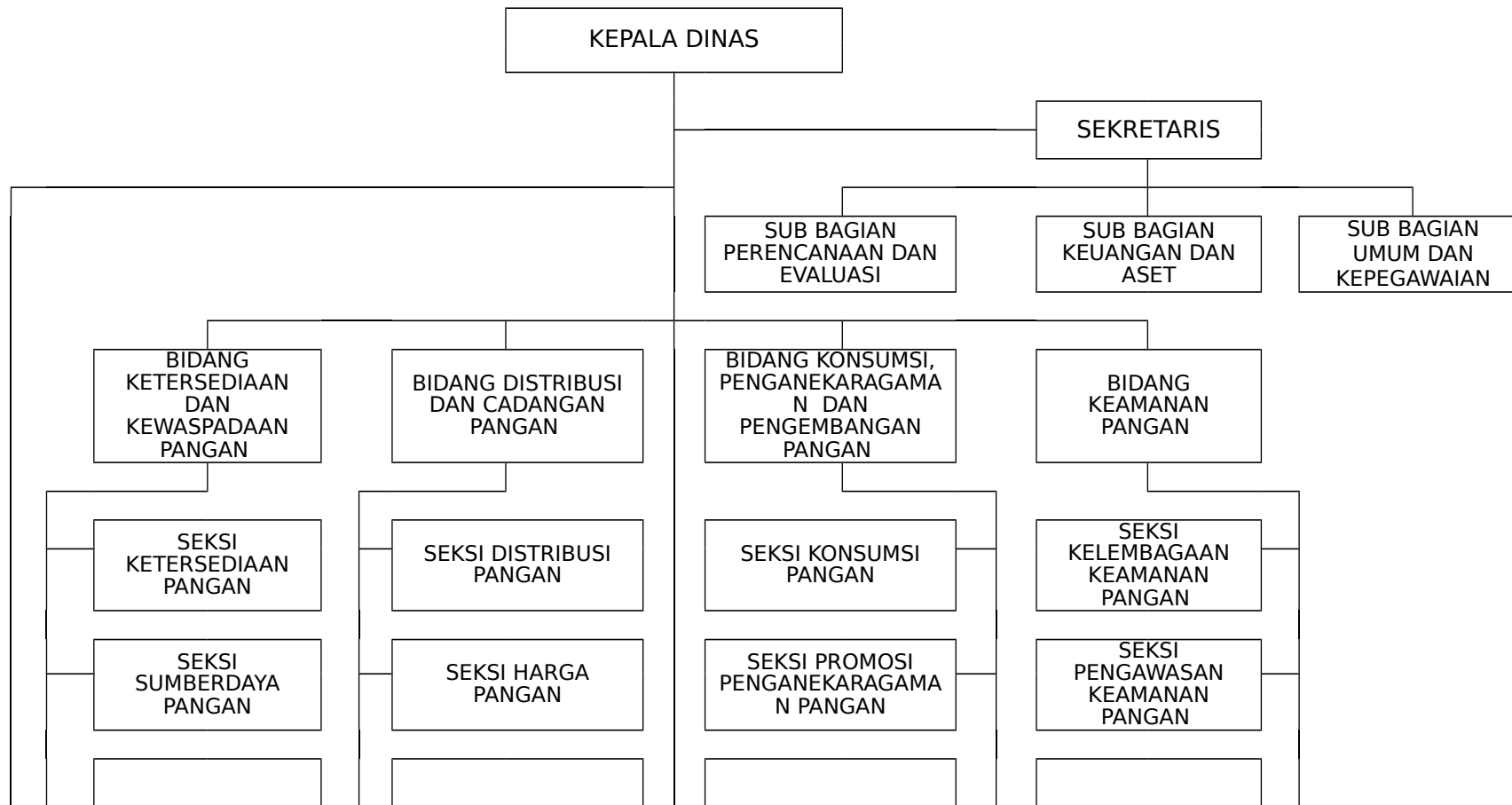
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumber Daya Pangan, dan Seksi Penanganan Kerawanan Pangan.

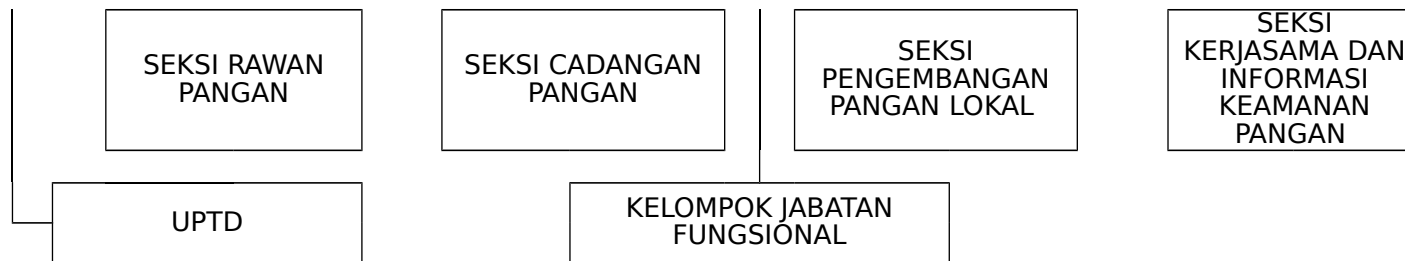
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

Kepala Bidang Konsumsi dan, Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi kelembagaan Keamanan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, dan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan





2.2 SUMBER DAYA

Susunan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 berjumlah 54 orang, 25 laki-laki dan 29 perempuan, yang terdiri dari 1 eselon II, 5 eselon III, 15 eselon IV dan 27 staf ASN serta 6 staf Non ASN sebagaimana Tabel 1.

Tabel 2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2017

| No. | JABATAN | GOL | ESELON | PENDIDIKAN |
|-----|--|--------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Dinas | IV / b | II | S2 |
| 2. | Sekretaris | IV / b | III | S2 |
| 3. | Kepala Bidang Golongan: IV/ a 4 orang | | III | S2 : 2 orang S1 : 2 orang |
| 4. | Kasubbag / Kasi Golongan : IV/a 3 orang III/ d 12 orang | | IV | S2 : 4 orang S1 : 11 orang |
| 5. | Staf Golongan : II/ b 1 orang II/ c 2 orang II/ d 1 orang III/ a 8 orang III / b 10 orang III/c 1 orang III/d 4 orang Non ASN 6 orang | | | SMA : 10 orang S1 : 16 orang S 2 : 1 orang |

Sumber : data terolah per Oktober 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang, kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah memberikan pelayanan pada bidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Pelayanan tersebut berupa fasilitasi,

sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dalam bidang pengembangan panganekaragaman pangan lokal, pemantauan dan pengawasan ketersediaan, harga dan distribusi pangan, pengawasan dan pemantauan keamanan pangan segar asal tumbuhan (sayur dan buah) dan koordinasi dengan stakeholder terkait ketahanan pangan.

Secara umum capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menunjukkan hasil yang bagus baik kinerja keuangan yang selalu diatas 95% maupun indikator kinerja dengan capaian diatas 95%.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Ketersediaan Pangan utama per 1000 penduduk (kg/1000 penduduk) | | v | | 115,510 | 117,820 | 120,170 | 122,580 | 192,719 | 153,643 | 169,590 | 227,075 | 191,760 | 193,114 | 133 | 144 | 189 | 156 | 100 |
| 2 | Lumbung pangan masyarakat (kelurahan) | | | v | 10 | 14 | 18 | 22 | - | 14 | 25 | 46 | 52 | - | 140 | 179 | 256 | 236 | - |
| 3 | Skor pola pangan harapan (satuan skor) | | v | | 86 | 89 | 92 | 95 | 92 | 86.3 | 88.7 | 90.6 | 90.9 | 91 | 100 | 99.66 | 98.48 | 95.68 | 98.91 |
| 4 | Kelurahan Mandiri Pangan (kelurahan) | | | v | 8 | 10 | 12 | 14 | - | 10 | 12 | 16 | 17 | - | 125 | 120 | 133 | 121 | - |
| 5 | Penanganan daerah rentan rawan pangan (kelurahan) | | v | | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 100 |

Sumber : data diolah

Tabel. 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

| Uraian | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggar-an | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Belanja Tidak Langsung | 1,095,409,000 | 1,228,738,000 | 1,217,989,200 | 1,456,488,820 | 1,852,530,820 | 1,072,409,349 | 1,141,689,640 | 1,153,405,838 | 1,398,229,267 | 1,769,932,566 | 15% | 14% |
| Belanja Pegawai | 1,095,409,000 | 1,228,738,000 | 1,217,989,200 | 1,456,488,820 | 1,852,530,820 | 1,072,409,349 | 1,141,689,640 | 1,153,405,838 | 1,398,229,267 | 1,769,932,566 | 15% | 14% |
| Belanja Langsung | 1,282,672,000 | 1,719,113,000 | 2,842,588,000 | 3,288,745,000 | 4,369,522,000 | 1,273,654,718 | 1,709,043,263 | 2,778,938,941 | 3,150,324,891 | 4,328,971,838 | 36% | 36% |
| Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran | 154,945,000 | 197,970,000 | 183,583,000 | 222,603,000 | 175,866,000 | 147,127,718 | 194,068,263 | 178,060,941 | 199,750,502 | 170,796,588 | 5% | 5% |
| Prog. Pelayanan Sarana & Prasarana Aparatur | 73,932,000 | 82,299,000 | 84,360,000 | 370,648,000 | 115,050,000 | 73,932,000 | 82,299,000 | 83,847,000 | 274,857,219 | 109,700,250 | 71% | 45% |
| Prog Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 37,320,000 | 36,000,000 | 25,630,000 | 42,900,000 | 57,520,000 | 37,320,000 | 36,000,000 | 25,120,000 | 41,479,500 | 57,520,000 | 17% | 18% |
| Program Ketahanan Pangan | 605,000,000 | 1,010,270,000 | 1,817,615,000 | 1,852,594,000 | 3,351,086,000 | 604,200,000 | 1,007,485,000 | 1,767,281,900 | 1,842,687,670 | 3,325,890,000 | 57% | 57% |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 411,475,000 | 392,574,000 | 731,400,000 | 800,000,000 | 670,000,000 | 411,075,000 | 389,191,000 | 724,629,100 | 791,550,000 | 665,065,000 | 19% | 19% |

Sumber : Laporan Keuangan Ketahanan Pangan 2012-2016

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Seiring dengan perkembangan pembangunan, urusan ketahanan pangan menjadi sangat penting dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah cukup, aman, merata, dan terjangkau semua lapisan masyarakat sampai di tingkat keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, ketahanan pangan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup besar. Beberapa tantangan pengembangan ketahanan pangan di Kota Semarang antara lain :

1. Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan.
2. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
4. Masih banyak beredar bahan pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama penggunaan bahan tambahan non pangan yang ditambahkan ke dalam jajanan anak sekolah.
5. Kendala akses pangan masyarakat yang disebabkan oleh faktor kemiskinan.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, namun terdapat beberapa peluang yang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam pengembangan ketahanan pangan di Kota Semarang, diantaranya:

1. Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;
2. Dinas ketahanan pangan sudah mempunyai kader ketahanan pangan disetiap kelurahan yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari Dinas ketahanan Pangan dalam menyebarluaskan informasi tentang panganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragamn Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan;

3. Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
4. Pemberdayaan kelurahan mandiri pangan maupun warung desa;
5. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terutama dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
6. Dinas Ketahanan Pangan membina 36 warung desa, 17 lumbung pangan, 4 kelompok distribusi pangan masyarakat yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Indikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang lima tahun ke depan, yaitu :

- Kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas, seiring dengan berkurangnya lahan pertanian, di satu sisi jumlah penduduk semakin bertambah yang secara otomatis membutuhkan ketersediaan pangan yang terus bertambah sehingga sangat bergantung kepada wilayah pertanian sekitar seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang. Produksi beras Kota Semarang Tahun 2016 adalah 22.582 ton sementara berdasarkan data konsumsi beras penduduk Kota Semarang Tahun 2016 adalah 164.423,25 ton/tahun (jumlah penduduk 1.648.279 jiwa dan konsumsi beras adalah 273,3 gram/kapita/hari)
- Masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam akses pangan yang disebabkan karena kemiskinan
- Sulitnya merubah pola pikir masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan, sebagai contoh sumber karbohidrat utama didominasi oleh konsumsi beras padahal banyak potensi sumber karbohidrat seperti singkong, talas, sukun yang dapat disubstitusi dalam memperkaya keragaman konsumsi pangan.
- Masih banyak ditemukan jajanan anak sekolah yang tidak aman sehingga diperlukan pendampingan, edukasi baik bagi penjual, anak-anak sekolah maupun orang tua/guru dalam membantu pengawasan keamanan pangan bagi anak usia dini.
- Kurangnya kesadaran masyarakat (khususnya ibu-ibu rumah tangga sebagai penyedia konsumsi bagi keluarga) akan pentingnya pangan bergizi dan diversifikasi pangan

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

| KONDISI SAAT INI | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALA HAN |
|--|---|--|--|
| | INTERNAL | EKSTERNAL | |
| Kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas | Lahan pertanian semakin terbatas | Jumlah penduduk terus bertambah | Penyediaan pangan bergantung pada daerah sekitar |
| Kesulitan dalam akses pangan | Faktor kemiskinan | Tidak optimalnya fungsi lumbung pangan masyarakat | Rendahnya akses pasar karena faktor kemiskinan |
| Konsumsi masih didominasi beras dan terigu serta belum sesuai kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Potensi lokal (umbi-umbian) masih jadi pangan inferior (dipandang sebelah mata) | Mind set masyarakat menganggap pangan lokal mempunyai citarasa yang tidak enak | Sulitnya merubah pola pikir masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan |
| Masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak aman | Kurangnya edukasi orang tua kepada anak sekolah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pangan yang aman | Kurangnya kesadaran penjual jajanan untuk menyajikan jajanan yang aman | Belum optimalnya sosialisasi, edukasi dan pembinaan keamanan pangan kepada penjual maupun guru, anak didik |

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Walikota Semarang tahun 2016-2021 adalah "Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam 4 (empat) Misi Kota Semarang yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas,
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik,
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan,

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Penjabaran dari misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas** dengan program prioritas menyangkut penguatan karakter, kebudayaan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olah raga serta peningkatan kesejahteraan sosial.
2. **Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik** dengan program prioritas peningkatan transparansi dan akuntabilitas, manajemen pemerintahan unggul dan pelayanan public.
3. **Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan** dengan program prioritas menyangkut tata kelola infrastruktur berkelanjutan, peningkatan ruang terbuka publik, transportasi berkelanjutan, dan jejaring kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.
4. **Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif** dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan produksi kreatif

Berdasarkan penjabaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menunjang pencapaian misi keempat yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mendukung pencapaian Misi 1 yaitu mewujudkan kedaulatan pangan, tujuan

pembangunan 1 yaitu meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan sasaran 2 yaitu peningkatan diversifikasi pangan.

Dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Visi yaitu "Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah" dan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Tujuan :

Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran

Sasaran :

Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.

2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.

- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Sasaran:

- a. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
 - b. Tercapainya ketersediaan pangan utama.
 - c. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
 - d. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
 - e. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
 - f. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan panganekaragaman dan mutu pangan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan panganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- b. Mengembangkan sistem pengawasandan pembinaan keamanan pangan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- b. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Berdasarkan telaah renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mendukung pencapaian misi 2 dan misi 3 yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Kota Semarang

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Semarang, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka menentukan pilihan tindakan (program dan kegiatan) yang strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, maka untuk menemukan faktor-faktor kunci keberhasilan diperlukan analisis. Analisis yang akan digunakan adalah analisis SWOT. Analisis ini akan memperhitungkan baik kondisi lingkungan internal maupun kondisi lingkungan eksternal.

1. LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan internal bersifat saat ini dan cenderung dapat dikontrol dalam batas-batas wilayah kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Hasil analisis atas lingkungan internal dirumuskan dalam dua kelompok faktor, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Dilihat dari posisi Kota Semarang secara geografis dan topografis seperti yang sudah disebutkan di atas, jenis tanah yang cukup dominan untuk pertanian adalah jenis mediteran coklat tua yang cocok bagi pengembangan tanaman tahunan/keras, tanaman hortikultura dan tanaman palawija yang mampu mendukung ketahanan pangan Kota Semarang.

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan antara lain : beberapa Koperasi Unit Desa, BRI Unit Desa, kios sarana, pasar hewan, Pos Kesehatan Hewan, klinik hewan, Tempat pelelangan Ikan (TPI), dan Rice Mill Unit (RMU) serta ditunjang dengan kelancaran distribusi pangan maupun akses pangan. Disamping itu, aspek sumber daya manusia juga sangat penting peranannya dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Semarang. Oleh sebab itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Dinas Kesehatan dalam merencanakan kebijakan Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Pengembangan ketahanan pangan pada tingkat masyarakat sangat didukung oleh keberadaan kelurahan-kelurahan mandiri pangan, lumbung pangan, warung desa, kader ketahanan pangan, kelompok PKK tingkat kelurahan, kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal yang potensial untuk dikembangkan menjadi pengolah produk pangan unggulan Kota Semarang serta potensi pangan lokal seperti ubi kayu, suweg, uwi, gembili, garut (lerut), dan ganyong.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

➤ **KEKUATAN**

1. Agroklimat Kota Semarang yang cocok untuk pengembangan komoditas pangan lokal seperti ubi kayu, talas, suweg, uwi, gembili, sukun, pisang dan lain sebagainya yang memperkaya sumber pangan dalam rangka diversifikasi pangan;
2. Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan antara lain : akses jalan yang baik, pasar, lumbung pangan, warung desa, kelompok distribusi pangan masyarakat dan alur distribusi pangan yang baik;

3. Dimilikinya potensi pengembangan produksi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, maupun perkebunan dan kehutanan;
4. Adanya kelompok-kelompok pengolah pangan lokal.

➤ **KELEMAHAN**

1. Keterbatasan lahan pertanian sehingga bahan pangan pokok sebagian besar disuplai dari kabupaten sekitar;
2. Rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal;
3. Koordinasi antar instansi melalui Dewan Ketahanan Pangan belum optimal.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Lingkungan eksternal bersifat masa depan dan cenderung tidak dapat dikontrol dalam batas-batas wilayah kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Hasil analisis atas lingkungan eksternal dirumuskan dalam dua kelompok faktor, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor peluang dan ancaman sebagai berikut :

➤ **PELUANG**

1. Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
2. Pemberdayaan kelurahan mandiri pangan maupun warung desa;
3. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terutama dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

➤ **ANCAMAN**

1. Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat yang tidak terjamin mutu dan keamanannya;
2. Ketergantungan beras terhadap wilayah sekitar;

3. Konsumsi pokok masyarakat didominasi oleh beras dan ketersediaan beras bergantung dari pasokan daerah sekitar.
4. Masih tingginya angka kemiskinan di beberapa kelurahan yang menyebabkan akses pangan kurang optimal.
5. Banyaknya jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
6. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dari analisa SWOT diperoleh identifikasi atas faktor-faktor lingkungan strategis yang selanjutnya dilakukan interaksi antar faktor untuk merumuskan issue strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang lima tahun ke depan, yaitu :

1. Belum mantapnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian

- Kebutuhan pangan Kota Semarang bergantung dari pasokan daerah sekitar.
- Cadangan pangan. Kondisi iklim yang tidak menentu dapat menimbulkan bencana yang tidak terduga (banjir, longsor) sehingga memerlukan sistem pengaturan cadangan pangan yang baik untuk meminimalkan terjadinya rawan pangan. Kondisi saat ini yang belum optimal antara lain: (1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan tidur), (3) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan lainnya.

2. Belum optimalnya kemampuan mengakses pangan

- Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan akses pangan.
- Menjamin stabilitas harga pangan. Isu tentang stabilitas harga pangan penting terutama apabila masa panen tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen.

3. Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal

- Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat, namun konsumsi pangan sumber protein, umbi-umbian, sayur dan buah masih jauh dari harapan.
- Pengembangan pangan lokal terkendala oleh belum berkembangnya teknologi tepat guna dalam pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta, belum optimalnya usaha merubah perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, dan rendahnya citra pangan lokal.

4. Belum optimalnya mutu dan keamanan pangan

- Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
- Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang berbahaya khususnya pada jajanan anak sekolah
- Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Dalam rangka mendukung pencapaian misi 4 : memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif, dengan tujuan RPJMD meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang akan diupayakan pencapaiannya oleh segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan adalah menjamin ketahanan pangan bagi penduduk. Ketahanan pangan penduduk terjamin apabila pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, beragam dan aman, terdistribusi merata di seluruh wilayah, dan pola konsumsi masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman untuk hidup yang aktif dan produktif.

4.2 SASARAN

Mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, maka sasaran pembangunan urusan pangan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah meningkatnya kemandirian pangan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi pangan wilayah.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | CAPAIAN PADA TAHUN 2015 | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | | TARGET AKHIR |
|----|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Menjamin ketahanan pangan penduduk | Tingkat ketahanan pangan | Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat | Tingkat ketahanan pangan | % | 89 | 89.275 | 89.825 | 90.375 | 90.925 | 91.475 | 92.025 | 92.025 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang selama tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Ketahanan pangan Kota Semarang
 - b. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
 - c. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
2. Meningkatkan ketahanan pangan, dengan arah kebijakan :
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan, melalui :
 - Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan optimalisasi peran lumbung pangan / warung desa
 - Edukasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan
 - Intensifikasi koordinasi sinergi lintas sektor
 - pemberdayaan masyarakatdan perilaku pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman melalui :
 - Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
 - Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan secara terpadu

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021

| Visi : Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya | | | |
|---|--|--|---|
| Misi 4. : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif | | | |
| Tujuan 1 | Sasaran 2 | Strategi 3 | Arah Kebijakan 4 |
| Tujuan 1. Menjamin ketahanan pangan penduduk | Sasaran 1. Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat | Strategi 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang | Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang |
| | | | Arah Kebijakan 2. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang |
| | | | Arah Kebijakan 3. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang |
| | | Strategi 2. Meningkatkan ketahanan pangan | Arah Kebijakan 4. Peningkatan ketersediaan pangan dan peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman |

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Ketahanan Pangan maka program yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam BAB VIII RPJMD adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Sarana Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja, Program Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
 - c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - m. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
2. Program Sarana Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja, dengan kegiatan :
 - a. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

- b. Penyusunan LKPJ SKPD
 - c. Penyusunan laporan CALK
 - d. penyusunan lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - e. Penyusunan laporan Renja (Rencana Kerja)
 - f. Penyusunan LKJIP
 - g. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - h. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - i. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - j. Penyusunan Renstra SKPD
 - k. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan
 - l. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
4. Program Ketahanan Pangan, dengan kegiatan :
- a. Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan
 - b. Pemantauan rawan pangan
 - c. Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan
 - d. Penumbuhan cadangan pangan pemerintah
 - e. Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
 - f. Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan
 - g. Apresiasi ketahanan pangan
 - h. Pengembangan pangan lokal
 - i. Desiminasi cadangan pangan
 - j. Pemantauan dan analisis harga pangan
 - k. Penguatan distribusi pangan
 - l. Penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan olahan pangan
 - m. Sosialisasi dan informasi keamanan pangan
 - n. Pemahaman keamanan pangan masyarakat
 - o. Penguatan kelembagaan keamanan pangan
 - p. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
 - q. Pengembangan data ketersediaan pangan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan kegiatan :
- a. Aksi Desa Mandiri

- b. Pengembangan pemasaran produk pangan
- c. Pengembangan sumber daya pangan
- d. Penanganan rawan pangan

Capaian keuangan Tahun 2016 adalah Rp. 4.941.075.788,-. Selama lima tahun yang akan datang (2017-2021) diperkirakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Semarang untuk Program / Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1. Capaian Keuangan pada Tahun Dasar Perencanaan (2016) dan Proyeksi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 Yang Bersumber pada APBD Kota Semarang.

| No. | TAHUN ANGGARAN | JENIS BELANJA | JUMLAH ANGGARAN |
|-----|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | 2016 (Realisasi) | Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.769.932.566,- |
| | | Belanja Langsung | Rp 4.941.075.788,- |
| | | Total | Rp. 6.711.008.354,- |
| 2. | 2017 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.061.907.000,- |
| | | Belanja Langsung | Rp 2.970.908.000,- |
| | | Total | Rp. 5.032.815.000,- |
| 3. | 2018 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.018.606.953,- |
| | | Belanja Langsung | Rp 3.598.327.000,- |
| | | Total | Rp. 5.616.933.953,- |
| 4. | 2019 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.320.547.961,- |
| | | Belanja Langsung | Rp 3.679.591.000,- |
| | | Total | Rp. 6.000.138.961,- |
| 5. | 2020 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.622.376.993,- |
| | | Belanja Langsung | Rp 3.762.712.000,- |
| | | Total | Rp. 6.385.088.993,- |
| 6. | 2021 | Belanja Tidak Langsung | Rp. 3.180.910.775,- |
| | | Belanja Langsung | Rp 3.847.733.000,- |
| | | Total | Rp. 7.028.643.775,- |

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016-2021

| Program & Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan (2016) | | Target Kinerja, Sasaran & Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---|-------------------|
| | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |
| | | Target | Rp (000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | 12.772.831 | | 8.389.451 | | 8.213.272 | | 9.441.805 | | 10.669.881 | | 12.942.434 | | 49.656.844 |
| Belanja Pegawai | | | 12.772.831 | | 8.389.451 | | 8.213.272 | | 9.441.805 | | 10.669.881 | | 12.942.434 | | 49.656.844 |
| BELANJA LANGSUNG | | | 4.941.076 | | 2.970.908 | | 3.598.327 | | 3.679.591 | | 3.762.712 | | 3.847.733 | | 17.859.271 |
| Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran | 100% | 170.585 | 100% | 458.702 | 100% | 874.978 | 100% | 896.852 | 100% | 919.273 | 100% | 942.255 | 100% | 4.092.060 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani | 17 orang | 49.309 | 47 orang | 52.025 | 47orang | 59.861 | 47orang | 65.222 | 47orang | 69.273 | 47 orang | 74.255 | 47 orang | 369.945 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | Kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan pajaknya | 4 unit | 0 | 5 unit | 0 | 7 unit | 13.000 | 7 unit | 17.000 | 7 unit | 18.500 | 7 unit | 19.000 | 7 unit | 67.500 |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 26 jenis | 11.420 | 26 jenis | 5.920 | 26 jenis | 6.808 | 34 jenis | 7.500 | 34 jenis | 9.500 | 34 jenis | 10.000 | 34 jenis | 50.420 |
| Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yg tersedia | 43 macam | 5.903 | 43 macam | 5.903 | 43 macam | 18.000 | 43 macam | 18.000 | 43 macam | 18.000 | 43 macam | 18.000 | 43 macam | 83.806 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah macam barang cetakan yang disediakan | 12 macam | 7.075 | 12 macam | 7.075 | 12 macam | 8.500 | 12 macam | 8.500 | 12 macam | 9.000 | 12 macam | 9.500 | 12 macam | 49.650 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Jumlah alat listrik yang disediakan | 5 buah | 650 | 10 buah | 650 | 86 buah | 5000 | 86 buah | 5.000 | 86 buah | 6.000 | 86 buah | 6.000 | 359 buah | 23.300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan ktr yang disediakan | 1 unit | 8.000 | 4 unit | 72.350 | 9 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.350 |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah macam bahan dan peralatan pembersih yang disediakan | 20 macam | 2.159 | 23 macam | 2.159 | 23 macam | 2.500 | 23 macam | 3.000 | 23 macam | 3.000 | 23 macam | 3.500 | 23 macam | 16.318 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 paket | 1.000 | 1 paket | 1.000 | 1 paket | 1.000 | 1 paket | 1.000 | 4 paket | 4.000 |
| Penyediaan makanan dan minuman | penyediaan makanan minum rapat | 12 bulan | 8.550 | 12 bulan | 6.120 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 33.000 | 12 bulan | 35.000 | 12 bulan | 36.000 | 12 bulan | 148.670 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | 52.800 | 12 bulan | 220.300 | 12 bulan | 380.000 | 12 bulan | 380.000 | 12 bulan | 385.000 | 12 bulan | 390.000 | 12 bulan | 1.733.100 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 bulan | 170.000 | 12 bulan | 173.500 | 12 bulan | 175.000 | 12 bulan | 180.000 | 12 bulan | 673.500 |
| Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran | Jumlah tenaga non ASN yang digunakan | 2 orang | 30.000 | 4 orang | 86.200 | 6 orang | 180.309 | 8 orang | 185.130 | 8 orang | 190.000 | 8 orang | 195.000 | 8 orang | 866.339 |
| Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 109.700 | 100% | 121.200 | 100% | 235.000 | 100% | 240.875 | 100% | 246.897 | 100% | 253.069 | 100% | 1.097.041 |
| Pengadaan kendaraan dinas / operasional | Jumlah pengad. kendaraan roda 4 dan roda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 unit | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 unit | 40.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengad perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 unit | 40.000 | 5 unit | 40.000 | 5 unit | 45.000 | 15 unit | 125.000 |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|---|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | pemeliharaan rutin gedung kantor | 1 kegiatan | 38.400 | 1 kegiatan | 51.400 | 1 kegiatan | 95.000 | 1 kegiatan | 100.000 | 1 kegiatan | 102.000 | 1 kegiatan | 102.000 | 6 kegiatan | 488.000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | servis, penggantian sparepart dan BBM kendaraan roda 4 dan roda 2 | 12 bulan | 76.650 | 12 bulan | 69.800 | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 100.875 | 12 bulan | 104.897 | 12 bulan | 106.069 | 12 bulan | 558.291 |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Kegiatan rehab gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prog Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 109.700 | 100% | 56.280 | 100% | 171.190 | 100% | 175.470 | 100% | 179.857 | 100% | 184.353 | 100% | 767.150 |
| Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara & Pembantu | penunjang kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu | 12 bulan | 48.920 | 12 bulan | 56.280 | 12 bulan | 146.280 | 12 bulan | 150.560 | 12 bulan | 154.947 | 12 bulan | 156.443 | 12 bulan | 713.430 |
| Penyusunan LKPJ SKPD | LKPJ ketahanan pangan | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 2.930 | 1 laporan | 2.930 | 1 laporan | 2.930 | 1 laporan | 2.930 | 5 laporan | 11.720 |
| Penyusunan laporan CALK | Laporan CALK | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 3.080 | 1 laporan | 3.080 | 1 laporan | 3.080 | 1 laporan | 3.080 | 5 laporan | 12.320 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja | 1 laporan | 5.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.682 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Penyusunan laporan Renja (Rencana Kerja) | Dokumen Renja | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 1.740 | 1 dokumen | 1.740 | 1 dokumen | 1.740 | 1 dokumen | 1.740 | 5 dokumen | 6.960 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Penyusunan LKJIP | LKJIP ketahanan pangan | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 2.500 | 1 laporan | 2.500 | 1 laporan | 2.500 | 1 laporan | 2.500 | 5 laporan | 10.000 |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan keuangan akhir tahun | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 2.500 | 1 laporan | 2.500 | 1 laporan | 2.500 | 1 laporan | 2.500 | 5 laporan | 10.000 |
| Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | 2 laporan | 0 | 2 laporan | 0 | 2 laporan | 3.080 | 2 laporan | 3.080 | 2 laporan | 3.080 | 2 laporan | 3.080 | 10 laporan | 12.320 |
| Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan prognosis realisasi anggaran | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 3.080 | 1 laporan | 3.080 | 1 laporan | 3.080 | 1 laporan | 3.080 | 5 laporan | 12.320 |
| Penyusunan Renstra SKPD | review renstra SKPD dan Renstra SKPD | 1 dokumen | 2.918 | 1 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 5.918 |
| Penyusunan RKA perubahan dan DPA perubahan | Dokumen R-DPPA dan DPPA | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 3.000 | 10 dokumen | 12.000 |
| Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | dokumen RKA, DPA | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | 0 | 2 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 3.000 | 2 dokumen | 3.000 | 10 dokumen | 12.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Ketahanan Pangan | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan (kkal/kapita/ hari) | 3.050 | 3.886.026 | 3051 | 1.600.041 | 3052 | 1.738.975 | 3053 | 1.773.775 | 3054 | 1.809.230 | 3055 | 1.845.415 | 3055 | 8.767.416 |
| | Cakupan penanganan daerah dampak bencana (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Tingkat keamanan | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------------|-----------|
| | pangan (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skor Pola Pangan Harapan | 87,1 | | 87,3 | | 87,5 | | 87,7 | | 87,9 | | 88,1 | | 88,1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan | Rumah pangan lestari (RPL) | 0 | 2.566.128 | 1 lokasi | 608.400 | 5 lokasi | 550.000 | 5 lokasi | 553.800 | 5 lokasi | 576.800 | 5 lokasi | 586.800 | 21 lokasi | 5.441.928 |
| | Jumlah pelatihan pangan B2SA | 63 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 88 kegiatan | |
| | Jumlah pelatihan RPL | 0 | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 5 kegiatan | | 25 kegiatan | |
| Pemantauan rawan pangan | Peta FSVA dan Peta SKPG | 2 laporan | 0 | 2 laporan | 55.392 | 2 laporan | 59.300 | 2 laporan | 61.100 | 2 laporan | 62.555 | 2 laporan | 64.555 | 12 laporan | 302.902 |
| Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan | pemantauan harga dan distribusi pangan | 16 pasar | 500.000 | 16 pasar | 87.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 pasar | 587.003 |
| Pembentukan cadangan pangan pemerintah Kota | Persentase penyaluran bantuan kepada lokasi bencana | 100% | 0 | 100% | 119.000 | 100% | 92.451 | 100% | 93.651 | 100% | 94.651 | 100% | 96.651 | 100% | 496.404 |
| Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan | jumlah koordinasi instansi terkait | 7 kegiatan | 100.000 | 7 kegiatan | 90.000 | 7 kegiatan | 80.250 | 7 kegiatan | 81.450 | 7 kegiatan | 82.450 | 7 kegiatan | 84.450 | 42 kegiatan 6 laporan | 518.600 |
| Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu&keamanan pangan | jumlah pembinaan dan pengawasan keamanan pangan | 26 kegiatan | 184.958 | 30 kegiatan | 159.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 kegiatan | 344.208 |
| Apresiasi ketahanan pangan | jumlah event promosi pangan lokal | 16 kegiatan | 0 | 20 kegiatan | 480.996 | 20 kegiatan | 421.415 | 20 kegiatan | 422.615 | 20 kegiatan | 423.615 | 20 kegiatan | 433.615 | 100 kegiatan | 2.182.256 |
| Pengembangan pangan lokal | Pengemb pangan lokal menjadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | 65.000 | 1 kegiatan | 75.000 | 1 kegiatan | 76.000 | 1 kegiatan | 78.000 | 1 kegiatan | 294.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|
| | produk khas | | | | | | | | | | | | | an | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Desiminasi cadangan pangan | Jumlah sosialisasi pemanfaatan cadangan pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemantauan dan analisis harga pangan | Informasi harga pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 laporan | 50.000 | 1 laporan | 55.000 | 1 laporan | 56.000 | 1 laporan | 57.000 | 4 laporan | 218.000 |
| Penguatan distribusi pangan | Pemberdayaan KDPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 kegiatan | 66.425 | 2 kegiatan | 67.625 | 2 kegiatan | 68.625 | 2 kegiatan | 68.790 | 8 kegiatan | 271.465 |
| Penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan olahan pangan | Kajian tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan olahan pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 laporan | 75.000 | 2 laporan | 76.800 | 2 laporan | 77.800 | 2 laporan | 78.800 | 8 laporan | 308.400 |
| Sosialisasi dan informasi keamanan pangan | Jumlah sosialisasi keamanan pangan Pembuatan film layanan masy | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 kegiatan 2 kegiatan | 75.000 | 48 kegiatan | 76.800 | 48 kegiatan | 77.800 | 48 kegiatan | 80.000 | 192 kegiatan | 309.600 |
| Pemahaman keamanan pangan masyarakat | Survey pemahaman keamanan pangan masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kegiatan | 49.954 | 1 kegiatan | 51.754 | 1 kegiatan | 52.754 | 1 kegiatan | 53.754 | 70% | 208.216 |
| Penguatan kelembagaan keamanan pangan | Jumlah pengawas keamanan pangan/ kader keamanan pangan Regulasi keamanan pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 orang 1 dok | 82.080 | 177 orang | 84.080 | 177 orang | 85.080 | 177 orang | 87.000 | 177 orang | 338.240 |
| Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan | Jumlah pengawasan keamanan pangan segar & sosialisasi keamanan pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 kegiatan | 72.100 | 7 kegiatan | 74.100 | 7 kegiatan | 75.100 | 7 kegiatan | 76.000 | 28 kegiatan | 297.300 |
| Pengembangan | Jumlah kajian | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| data ketersediaan pangan | ketersediaan pangan (neraca bahan makanan) | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Penanganan daerah rentan rawan pangan (kelurahan) | 88 | 665.065 | 97 | 734.685 | 106 | 578.184 | 115 | 592.639 | 124 | 607.455 | 133 | 622.641 | 133 | 3.135.604 |
| Aksi desa mandiri | Jumlah pelatihan pengembangan ketersediaan pangan | 30 kegiatan | 665.065 | 29 kegiatan | 451.290 | 29 kegiatan | 222.358 | 29 kegiatan | 227.358 | 29 kegiatan | 232.358 | 29 kegiatan | 237.358 | 175 kegiatan | 2.035.787 |
| Pengembangan pemasaran produk pangan | Jml fasilitas pemasaran produk pangan lokal | 0 | 0 | 2 kegiatan | 283.395 | 1 kegiatan | 228.826 | 1 kegiatan | 233.826 | 1 kegiatan | 238.826 | 1 kegiatan | 243.826 | 6 kegiatan | 1.228.699 |
| Pengembangan sumber daya pangan | Optimalisasi sumber daya pangan / akses pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 kelurahan | 127.000 | 5 kelurahan | 131.455 | 5 kelurahan | 136.271 | 5 kelurahan | 141.457 | 20 kelurahan | 536.183 |
| Penanganan rawan pangan | Jumlah kelurahan rawan pangan yang ditangani | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 kelurahan | 0 | 9 kelurahan | 0 | 9 kelurahan | 0 | 27 kelurahan | 0 | | |
| | Jumlah Anggaran | | 4.941.076 | | 2.970.908 | | 3.598.327 | | 3.679.591 | | 3.762.712 | | 3.847.733 | | 17.859.271 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan program / Kegiatan akan dicapai apabila tepat sasaran, serta melalui perencanaan yang baik. Oleh sebab itu target yang ingin dicapai harus jelas dengan indikator yang terukur. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya daya saing perekonomian daerah | Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 87,1 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | 88.1 |
| | | | Cakupan daerah rentan pangan | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 |
| | | | Ketersediaan pangan penduduk (kkal / kapita / hari) | 3.050 | 3.051 | 3.052 | 3.053 | 3.054 | 3.055 |

BAB VIII

PENUTUP

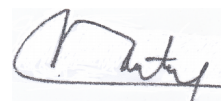
Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang tahun 2016 – 2021 ini dapat dijadikan dokumen yang memberikan arah dan pedoman dalam pembangunan ketahanan pangan, bagi segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan perubahan SKPD dari Kantor menjadi Dinas serta secara umum diharapkan dapat digunakan untuk menggerakkan partisipasi segenap stakeholders dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kota Semarang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, disamping sangat tergantung dari peran masyarakat dan dunia usaha (*stakeholders*), beserta aparatur Dinas Ketahanan Kota Semarang, diperlukan pula sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari segenap penyelenggaran pembangunan. Faktor-faktor ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap, yang didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang handal, sehingga hasilnya dapat menjadi optimal.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan diharapkan dapat lebih optimal dan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang hasil – hasilnya lebih dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Semarang,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG**



Drs. SAPTO ADI SUGIHARTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640123 198903 1 011

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Eselon
2. Cascading

INDIKATOR KINERJA ESELON DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | NAMA JABATAN ESELON III | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN ESELON IV | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|--|---------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat | Tingkat ketahanan pangan | Sekretaris | Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | Kasubbag Keuangan dan aset | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | Kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan pajaknya |
| | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki |
| | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yg tersedia |
| | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah macam barang cetakan yang disediakan |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik yang disediakan |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | NAMA JABATAN ESELON III | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN ESELON IV | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|---------|---------------------------|-------------------------|---------|-------------------|------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan ktr yang disediakan |
| | | | | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah macam bahan dan peralatan pembersih yang disediakan |
| | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan |
| | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | penyediaan makanan minum rapat |
| | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
| | | | | | | Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran | Jumlah tenaga non ASN yang digunakan |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | NAMA JABATAN ESELON III | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN ESELON IV | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|---------|---------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | Prog. Pelayanan Sarana & Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | Kasubbag Umum dan kepegawaian | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengad perlengkapan gedung kantor |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | pemeliharaan rutin gedung kantor |
| | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | servis, penggantian sparepart dan BBM kendaraan roda 4 dan roda 2 |
| | | | Prog Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi | Penyusunan LKPJ SKPD | LKPJ ketahanan pangan |
| | | | | | | Penyusunan laporan Renja (Rencana Kerja) | Dokumen Renja |
| | | | | | | Penyusunan LKJIP | LKJIP ketahanan pangan |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | NAMA JABATAN ESELON III | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN ESELON IV | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|---------|---------------------------|-------------------------|---------|-------------------|----------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Penyusunan Renstra SKPD | review renstra SKPD dan Renstra SKPD |
| | | | | | | Penyusunan RKA perubahan dan DPA perubahan | Dokumen R-DPPA dan DPPA |
| | | | | | | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | dokumen RKA, DPA |
| | | | | | Kasubbag Keuangan dan aset | Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara & Pembantu | penunjang kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu |
| | | | | | | Penyusunan laporan CALK | Laporan CALK |
| | | | | | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Laporan keuangan akhir tahun |
| | | | | | | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran |
| | | | | | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Laporan prognosis realisasi anggaran |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | NAMA JABATAN ESELON III | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN ESELON IV | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|---------|---------------------------|---|--|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | Program Ketahanan Pangan | Kebijakan ketahanan pangan | Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan | Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan | Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi instansi terkait |
| | | Kepala Bidang Ketersediaan dan kewaspadaan pangan | Program Ketahanan Pangan | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan penduduk | Kasi Kerawanan Pangan | Pemantauan rawan pangan | Peta FSVA dan Peta SKPG |
| | | | | | Kasi Ketersediaan Pangan | Pengembangan data ketersediaan pangan | Kajian ketersediaan pangan / Neraca Bahan makanan |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Penanganan daerah rentan rawan pangan | Kasi Ketersediaan Pangan | Aksi Desa Mandiri | Jumlah pelatihan pengembangan ketersediaan pangan |
| | | | | | Kasi Sumber Daya pangan | Pengembangan sumber daya pangan | jumlah kelurahan yang dioptimalkan sumber daya pangan / akses pangan |
| | | | | | Kasi Kerawanan Pangan | Penanganan Rawan Pangan | jumlah kelurahan rawan pangan yang ditangani |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | NAMA JABATAN ESELON III | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN ESELON IV | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
|---------|---------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan | Program Ketahanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | Kasi Konsumsi Pangan | Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan | Rumah pangan lestari (RPL) |
| | | | | | | | Jumlah pelatihan pangan B2SA |
| | | | | | | | Jumlah pelatihan RPL |
| | | | | | Kasi Promosi Panganekaragaman Pangan | Apresiasi Ketahanan Pangan | jumlah event promosi pangan lokal |
| | | | | | Kasi Pengembangan Pangan Lokal | | Pengemb pangan lokal menjadi produk khas |
| | | | | | | | |
| | | Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | Program Ketahanan Pangan | Cakupan penanganan daerah dampak bencana | Kasi Cadangan Pangan | Pembentukan cadangan pangan pemerintah | Persentase penyaluran bantuan kepada lokasi bencana |
| | | | | | Kasi Distribusi Pangan | Penguatan distribusi pangan | Pemberdayaan KDPM |
| | | | | | Kasi Harga pangan | Pemantauan dan analisis harga pangan | Informasi harga pangan |
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | NAMA JABATAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | NAMA JABATAN | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |

| | SASARAN | ESELON III | | | ESELON IV | | |
|-----|---------|-------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | | Kasi Distribusi Pangan | Pengembangan pemasaran produk pangan | Jml fasilitasi pemasaran produk pangan lokal |
| | | Kepala Bidang Keamanan Pangan | Program Ketahanan Pangan | Tingkat Ketahanan pangan | Kasi Kerjasama dan informasi keamanan pangan | Penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan olahan pangan Sosialisasi dan informasi keamanan pangan | Kajian tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan olahan pangan Jumlah sosialisasi keamanan pangan Pembuatan film layanan masy |
| | | | | | Kasi pengawasan keamanan pangan | Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan | Jumlah pengawasan keamanan pangan segar & sosialisasi keamanan pangan |
| | | | | | Kasi Kelembagaan keamanan pangan | Penguatan kelembagaan keamanan pangan | Jumlah pengawas keamanan pangan/ kader keamanan pangan Regulasi keamanan pangan |

Cascading Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

TUJUAN SKPD

Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD).

Catatan: Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

SASARAN

Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

Catatan: Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

PROGRAM

Definisi :
Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

KEGIATAN

Definisi :
Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program

| TUJUAN SKPD 1 | | | |
|------------------------------------|--------|------------------|-------------|
| Menjamin ketahanan pangan penduduk | | | |
| INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | KONDISI SAAT INI | TARGET TH 5 |
| Tingkat ketahanan pangan | % | 89.275 | 92.025 |

| SASARAN 1 | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| meningkatkan kemandirian pangan masyarakat | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN 1 | FORMULASI INDIKATOR | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tingkat ketahanan pangan | persentase komposit dari capaian aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan, aspek konsumsi dan pengankaragaman pangan dan aspek keamanan pangan | % | 89.83 | 90.38 | 90.98 | 91.48 | 92.03 |

| PROGRAM 1 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|--|
| Program Ketahanan Pangan | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM 1 | FORMULASI INDIKATOR | SATUAN | TH 1 | TH 2 | TARGET TH 3 | TH 4 | TH 5 | |
| Meningkatnya ketahanan pangan | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan penduduk | Jumlah kalori dalam bahan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi sebagai asupan per orang per hari | Kkal/Kapita/Hari | 3,050 | 3,052 | 3,053 | 3,054 | 3,055 | |
| | Cakupan distribusi pangan | Persentase jumlah kelurahan dengan distribusi pangan baik dibandingkan dengan total kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat keamanan pangan | persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dibagi jumlah total sampel pangan segar yang diperdagangkan; dengan hitungan secara kumulatif dari tahun 2012 hingga 2017. | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| | Skor Pola Pangan Harapan | proporsi konsumsi real 8 kelompok pangan (padi-padian), umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, minyak dan lemak, gula, sayur dan buah terhadap konsumsi idealnya | skor | 87.3 | 87.5 | 87.7 | 87.9 | 88.1 | |

| KEGIATAN 1 | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|------|-------------|------|------|
| Pengembangan konsumsi dan pengankaragaman pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| rumah pangan lestari | jumlah rumah pangan lestari | kelurahan | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman | Jumlah pelatihan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman | kegiatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| KEGIATAN 2 | | | | | | | |
|--|--|---------|------|------|-------------|------|------|
| Pemantauan rawan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Terlaksananya identifikasi daerah rentan rawan pangan di Kota Semarang | 1. peta FSVA | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2. Buku sistem kewaspadaan pangan dan gizi | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 3 | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|------|------|-------------|------|------|
| Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Terlaksananya koordinasi instansi terkait | Kajian ketersediaan pangan | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Koordinasi instansi terkait | kegiatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| KEGIATAN 4 | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|-------------|------|------|
| Pembentukan cadangan pangan pemerintah | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan dan penyaluran bantuan rawan pangan transien | Persentase penyaluran bantuan kepada lokasi yang terkena bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KEGIATAN 5 | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|-------------|------|------|
| Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| pemantauan harga dan distribusi pangan | pemantauan harga dan distribusi pangan | pasar | 16 | - | - | - | - |

| KEGIATAN 6 | | | | | | | |
|---|--|----------|------|------|-------------|------|------|
| Penguatan distribusi pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| memperkuat distribusi pangan masyarakat | pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat | kegiatan | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

| KEGIATAN 7 | | | | | | | |
|--|--|----------|------|------|-------------|------|------|
| Diseminasi cadangan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Penyebarluasan informasi cadangan pangan kepada lokasi rawan bencana | jumlah sosialisasi pemanfaatan cadangan pangan | kegiatan | - | - | 10 | 10 | 10 |

| KEGIATAN 8 | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|------|------|-------------|------|------|
| Pemantauan dan analisis harga | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tersedianya informasi harga pangan | Informasi harga pangan | laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| PROGRAM 2 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|--|--|
| Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM 2 | FORMULASI INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| KEGIATAN 9 | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|------|------|-------------|------|------|
| Apresiasi ketahanan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| fasilitasi pengolahan pangan lokal | jumlah promosi pangan lokal baik tingkat lokal, regional dan nasional | event | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| KEGIATAN 10 | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|------|------|-------------|------|------|
| Pengembangan pangan lokal | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| produktivitas pangan lokal | pengembangan pangan lokal menjadi produk khas wilayah | kegiatan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 11 | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|-------------|------|------|
| Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| pembinaan dan pengawasan keamanan pangan | jumlah pembinaan dan pengawasan keamanan pangan | kegiatan | 26 | - | - | - | - |

| KEGIATAN 12 | | | | | | | |
|--|---|---------|------|------|-------------|------|------|
| Penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan olahan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| keamanan pangan masyarakat | kajian tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) | laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | kajian tingkat keamanan pangan olahan | laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 13 | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|-------------|------|------|
| Sosialisasi dan informasi keamanan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Penyebarluasan informasi keamanan pangan kepada masyarakat | jumlah kegiatan sosialisasi keamanan pangan | kegiatan | - | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | Pembuatan film layanan masyarakat tentang keamanan pangan | kegiatan | - | 2 | - | - | - |

| KEGIATAN 14 | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|-------------|------|------|
| survey pemahaman keamanan pangan masyarakat | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan | survey pemahaman keamanan pangan masyarakat | kegiatan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 15 | | | | | | | |
|---|--|----------|------|------|-------------|------|------|
| Penguatan kelembagaan keamanan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| memperkuat kelembagaan keamanan pangan masyarakat | Jumlah regulasi keamanan pangan | dokumen | - | 1 | - | - | - |
| | jumlah pengawas keamanan pangan/ kader keamanan pangan | orang | - | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | forum komunikasi kader keamanan pangan tk kecamatan | kegiatan | - | - | 16 | - | - |
| | forum komunikasi kader keamanan pangan tk kota | kegiatan | - | - | - | 1 | - |

| KEGIATAN 16 | | | | | | | |
|---|---|----------|------|------|-------------|------|------|
| Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| pembinaan dan pengawasan keamanan pangan masyarakat | pengawasan pangan segar | kegiatan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | sosialisasi keamanan pangan (kantin sekolah, pedagang keliling, PIRT) | kegiatan | - | 6 | 6 | 6 | 6 |

| KEGIATAN 1 | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|------|------|-------------|------|------|
| Aksi Desa Mandiri | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |



| PROGRAM 2 (RUTIN) | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|------|------|--------|------|------|--|
| Program Pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM 2 | FORMULASI INDIKATOR | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | | |
| Pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana paratur | % | 100 | 100 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | 100 | 100 | 100 | |

| KEGIATAN 12 | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|--------|------|------|
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | Koordinasi dan konsultasi dalam daerah | bulan | 12 | 12 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 12 | 12 | 12 |

| KEGIATAN 13 | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|
| Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | Jumlah tenaga non ASN yang digunakan | orang | 6 | 8 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 8 | 8 | 8 |

| KEGIATAN 1 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------|------|--------|------|------|
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 | unit | - | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 2 | 2 | 2 |

| KEGIATAN 2 | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------|------|--------|------|------|
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | unit | - | - | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 5 | 5 | 5 |

| KEGIATAN 3 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|------|------|--------|------|------|
| Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | pemeliharaan rutin gedung kantor | kegiatan | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 4 | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|--------|------|------|
| Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | servis, penggantian sparepart, BBM kendaraan roda 4 & roda 2 | bulan | 12 | 12 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 12 | 12 | 12 |

| KEGIATAN 5 | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|------|------|--------|------|------|
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | Jumlah kegiatan rehab gedung | kegiatan | 1 | - | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | - | - | - |

| PROGRAM 3 (RUTIN) | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|------|------|--------|------|------|--|
| Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM 2 | FORMULASI INDIKATOR | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | | |
| Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu | tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan | persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan | % | 100 | 100 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | 100 | 100 | 100 | |

| KEGIATAN 1 | | | | | | | |
|---|---|--------|------|------|--------|------|------|
| Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Kelancaran pelayanan OPD | penunjang kinerja PA, KPA, Bendahara, BPP, Pembuku, pengurus barang | bulan | 12 | 12 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 12 | 12 | 12 |

| KEGIATAN 2 | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------|------|------|--------|------|------|
| Penyusunan laporan CALK | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Tersusunnya laporan CALK | Laporan CALK | laporan | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 3 | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | Laporan keuangan akhir tahun | laporan | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 4 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|------|------|--------|------|------|
| Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Tersusunnya laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | laporan | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 5 | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|
| Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran | Laporan prognosis realisasi anggaran | laporan | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 6 | | | | | | | |
|--|--|---------|------|------|--------|------|------|
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | laporan | 1 | 1 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 7 | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------|------|--------|------|------|
| Penyusunan LKPI SKPD | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| Tersusunnya LKPJ | LKPJ Dinas Ketahanan Pangan | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|------------------|-----------------------------|---------|---|---|---|---|---|

| KEGIATAN 8 | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------|------|----------------|------|------|
| Penyusunan laporan rencana kerja (Renja) | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tersusunnya laporan Renja | Laporan Renja | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 9 | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------|------|------|----------------|------|------|
| Penyusunan LKJIP | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tersusunnya LKJIP | LKJIP Dinas ketahanan pangan | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| KEGIATAN 10 | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|------|------|----------------|------|------|
| Penyusunan Renstra SKPD | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tersusunnya Review Renstra | Review Renstra | laporan | 1 | - | - | - | - |

| KEGIATAN 11 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|------|------|----------------|------|------|
| Penyusunan RKA perubahan dan DPA perubahan | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tersusunnya R-DPPA dan DPPA OPD | R-DPPA dan DPPA OPD | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| KEGIATAN 12 | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|------|------|----------------|------|------|
| Penyusunan RKA dan DPA SKPD | | | | | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | SATUAN | 2017 | 2018 | TARGET 2019 | 2020 | 2021 |
| Tersusunnya RKA dan DPA OPD | RKA dan DPA | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |